

MISI PERDAMAIAN REPUBLIK INDONESIA ATAS RUSIA UKRAINA

(Perspektif Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D)

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah Lembaga-Lembaga
Internasional

Dosen Pengampu:

Dr. H. Ija Suntana, M. Ag



Disusun Oleh :

Tasya Fadlia Alfaini

HTN VI B

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul **“Misi Perdamaian Republik Indonesia Atas Rusia Ukraina”** dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya.

Dan juga penulis berterima kasih kepada dosen bapak Dr. H. Ija Suntana, M. Ag. yang telah memberikan tugas ini kepada penulis. Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Kebijakan Ekonomi, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah penulis buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang disusun ini dapat berguna bagi penulis maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Bandung, Juli 2022

Tasya Fadlia Alfaini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1. Rumusan Masalah	1
1.2. Tujuan	2
BAB II Pembahasan	3
2.1. Biografi Prof. Hikmahanto Juwana	3
2.2. Perspektif Prof. Hikmahanto Juwana terhadap misi Rusia Ukraina	4
2.3. Efektifitas Republik Indonesia dalam misi perdamaian Rusia Ukraina	9
BAB III Penutup	12
3.1. Kesimpulan	12
Daftar Pustaka	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mata dunia kini tertuju pada Indonesia atas kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia. Apakah kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi akan berdampak membuka peluang dialog damai dan mengakhiri perang, atau sebaliknya. Beberapa pendapat pakar hukum internasional, salah satunya Hikmahanto Juwana, Tiga komponen sosial membentuk diri manusia: komponen afektif, kognitif komponen, dan komponen konatif. Afektif adalah komponen emosional; kognitif adalah sebuah komponen intelektual, dan merupakan komponen konatif kebiasaan. Hubungan antara pengetahuan dan perilaku, khususnya dalam ilmu politik, menjadi perhatian peneliti¹. Berdasarkan komponen itulah kunjungan Jokowi ke Rusia dan juga ke Ukraina. Kedua negara sedang berperang bersama. Menurut Hikahanto, upaya gencatan senjata sama sekali bukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Rusia terhadap Ukraina dan juga Rusia terhadap Amerika Serikat dan sekutunya karena baru-baru ini, dengan kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri. Amerika Serikat dan Presiden Macro, misalnya, ingin mengintensifkan pertahanan Ukraina. Saat melawan Rusia, yang dilakukan Presiden adalah mengupayakan gencatan senjata dan jika misalnya antara Rusia dan Ukraina ada masalah, tolong selesaikan secara damai. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dan masyarakat untuk memahami bagaimana Indonesia dapat menyelesaikan masalah Rusia dan Ukraina.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana isi Biografi Prof. Hikmahanto Juwana ?
- 2) Bagaimana Perspektif Prof. Hikmahanto Juwana terhadap misi perdamaian Rusia Ukraina?
- 3) Bagaimana Efektifitas Republik Indonesia dalam misi perdamaian Rusia Ukraina?

¹ Jerit, J. & Barabas, J. (2017). Meninjau Kembali Kesenjangan Gender dalam Pengetahuan Politik. Politik Perilaku, hal 817–838.

1.3. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui isi Biografi Prof. Hikmahanto Juwana
- 2) Untuk mengetahui Perspektif Prof. Hikmahanto Juwana terhadap misi Rusia Ukraina
- 3) Untuk mengetahui Efektifitas Republik Indonesia dalam misi perdamaian Rusia Ukraina

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Biografi Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D

Profesor Hikmahanto Juwana adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Beliau , yang bernama asli Gihik, lahir pada 23 November 1965 di Jakarta. Ayahnya beliau adalah seorang duta besar, sehingga tidak mengherankan jika beliau fasih berbahasa Inggris. Setelah lulus SMA pada tahun 1987, beliau memutuskan untuk belajar hukum dengan mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta.

Setelah menyelesaikan studinya hingga jenjang S1, Hikmahanto menyempatkan diri bekerja di kantor pengacara. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ketika beliau menyaksikan dan mengalami berbagai manipulasi hukum, dia terkejut dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Sebuah permainan penegakan hukum di tanah air dianggap tidak hanya sangat menyinggung hati nurani, Kekhawatirannya mempengaruhi perjalanan karir beliau. Setelah meninggalkan pekerjaannya, beliau memutuskan untuk kembali kuliah untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu, berangkat ke Jepang untuk melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Keio di Jepang.

Pada tahun 1992 memperoleh gelar Master of Laws (LL.M) dari Cherry Blossom Country. Tidak sampai di situ, dan di tahun yang sama beliau langsung mendaftar untuk mengejar gelar PhD atau PhD di Universitas Indonesia. Namun, program ini tidak selesai kemudian. Sebaliknya, beliau mengejar gelar PhD di University of Nottingham, Inggris. Pada tahun 1997, beliau juga memborong gelar Doktor Filsafat (PhD). Kemudian beliau yang dari tahun 2004 hingga 2008 menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan guru besar termuda di bidang hukum internasional.

Beliau juga diangkat sebagai Asisten Sekretaris Kekayaan Intelektual dari Agustus 1999 hingga Juli 2000 di Kantor Koordinator Ekonomi III, Kantor Koordinasi Ekonomi. Setelah itu, beliau diakreditasi mulai Juli 2000 hingga Februari 2001. beliau akan menjadi staf profesional Menteri Koordinator Perekonomian di bidang hukum dan lembaga. Karya ilmiahnya di bidang penulisan telah diterbitkan

dalam berbagai seminar, jurnal dan buku. Berbagai publikasi telah diterbitkan di dalam dan luar negeri².

Diantaranya adalah tinjauan hukum organisasi internasional tentang perbedaan status badan PBB dan badan khusus, dan dampak sengketa perdagangan AS-Jepang terhadap tatanan perdagangan internasional (analisis hukum berdasarkan GATT/WTO). konsensus), konflik kepentingan ekonomi internasional, dan tantangan pendidikan. Hukum domestik di dunia global, dan masalah kepemilikan di Kepulauan Sipadan dan Rigitan.

Beberapa tulisannya, antara lain *Nihon To Indonesia Horitsu no Manabika* (dalam bahasa Inggris), juga berbahasa Jepang di luar negeri. Selanjutnya, perluasan hak kekayaan intelektual di Asia-Indonesia. Pada pertengahan 2010, ketika Ketua KPK terpilih untuk mengisi kekosongan Antasari sebelumnya, Forum Perdana Menteri Indonesia mengusulkan Hikmahanto. Namun, mantan anggota unit ke-8 itu tidak mencalonkan diri karena masa jabatannya hanya satu tahun. Dengan masa jabatan yang singkat itu, sepertinya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lain halnya jika dia merasa bisa menjalankan tugasnya selama empat tahun, yang fokus mengawasi badan hukum KPK untuk memberantas korupsi.

Belakangan, posisi itu akhirnya diisi oleh Abraham Samad, advokat muda kelahiran Makassar. Meski meraih prestasi tertentu, pria rendah hati ini tidak melupakan jasa orang-orang yang berperan dalam kesuksesannya. Di antara banyak orang yang mengambil peran itu, orang tuanyalah yang berpikir bahwa dialah yang paling menentukan kesuksesannya.

2.2. Perspektif Prof. Hikmahanto Juwana terhadap misi perdamaian

Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia berdampak dengan terbukanya peluang dialog perdamaian dan mengakhiri perang datang dalam rangka untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan baik tragedi kemanusiaan di Ukraina maupun tragedi kemanusiaan akibat adanya permasalahan lainnya yang berkaitan dengan tangan di dunia terutama di negara-negara berkembang. Ini menjadi suatu langkah yang sangat perlu diapresiasi dari bapak Presiden untuk mencoba lakukan gencatan senjata antara dua negara kita perlu ingat juga bahwa Israel dan Turki pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bapak Presiden bedanya

² Tirto Online diakses melalui <https://amp.tirto.id/m/hikmahanto-juwana-zg> pada 28 Juni 2022

adalah menteri luar negeri yang mengupayakan dan pada saat itu baru serangan itu dilancarkan oleh Rusia sehingga pada saat itu Rusia maupun Ukraina belum lelah. Jadi mereka masih bersemangat sehingga gagal upaya tersebut sekarang.

Kegiatan yang dilakukan oleh bapak Presiden ini tepat waktu karena mungkin kedua belah pihak ini sudah telah dan legitimasi masyarakat di kedua negara juga semakin mengecil untuk diteruskannya peran ini jadi dapat dengan mudah dilihat dari rekam jejak yang biasanya dilakukan oleh lebar Presiden Rusia Vladimir Putin dalam banyak aksi yang dilakukannya sebelumnya dapat berpotensi genjatan senjata ini berhasil. Hal ini yang pasti begini dua negara ini utamanya Rusia mungkin kalau mereka memang sudah lelah mereka membutuhkan penyelamatan muka kalau jika Rusia akan mengakhiri serangan ini karena apabila tiba-tiba Rusia mengakhiri tanpa ada angin dan lain sebagainya tentu dunia akan mengatakan bahwa Rusia sudah menyerah dan Rusia tidak mau melakukan itu. demikian juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy apabila misalnya dia tiba-tiba menyatakan Menyerah dari serangan Rusia ini pun tidak baik untuk Presiden zelinski. Oleh karena itu mereka membutuhkan pihak ketiga yang bisa menyelamatkan kita masing-masing dan dalam konteks inilah bapak Presiden hadir dan saya yakin kalau Presiden zelinski Presiden menginginkan bahwa serangan itu dihentikan sementara.

Jika melihat dari sudut pandang Rusia indikasinya itu besar karena Indonesia ada awal serangan ini berkolaborasi dengan Amerika Serikat dalam membuat resolusi yang mengutuk mengecam serangan Rusia dengan ini menapa sekarang Rusia mau menerima kunjungan bapak Presiden dan sudah dijadwalkan. Predisi para pakar karena meskipun Indonesia mungkin dianggap berpihak pada Amerika Serikat dan sekutunya namun Presiden Putin melihat bahwa opsi ini yang terbaik untuk bisa keluar dari situasi sekarang. Kemudian Indonesia nantinya akan di tanda kutip memanfaatkan untuk menyelamatkan dari Rusia baik artinya Rusia dan Ukraina. Negara Ukraina menganggap Indonesia adalah negara yang netral sehingga bisa menerima Presiden Jokowi dengan baik. Hal Ini sikap dari dua negara ini terhadap Indonesia memang dianggap bahwa Indonesia ini menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif yang netral. Lain halnya dengan Katakanlah ketika Boris Johnson Perdana Menteri Inggris datang ke Ukraina atau tadi saya katakan menteri luar negeri dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat bahkan juga petinggi dari Rumania mereka dalam konteks mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Ukraina zalewski untuk menghadapi serangan dari Rusia intinya adalah mereka tidak bersikap netral. Ini

berbeda dengan Indonesia demikian baik artinya dalam hal ini Rusia juga sebenarnya membutuhkan Indonesia atau pihak ketiga untuk mendamaikan perang begitu upaya gencatan senjata dilakukan dengan Ukraina sebenarnya terkait Rusia juga dari segi ekonomi juga terhambat karena pasokan gandum yang tidak bisa keluar terlalu banyak begitu yang tidak jadi aspal terlalu banyak dari segi ekonomi.

Dengan kehadiran Indonesia sampai dengan hari 120 lebih ini tidak ada negara ke-3 yang mencoba untuk mengupayakan gencatan senjata tidak seperti di awal dimana ada Israel dan Turki ini baru kali pertama dimana dalam jangka waktu yang cukup panjang itu ada negara dalam hal ini Indonesia yang mengupayakan hal ini. Jadi Indonesia sangat-sangat dibutuhkan dan jika dilihat dari sudut pandang Rusia selama ini kan mengatakan bahwa serangan ke Ukraina ini akan merupakan Serangan yang sangat cepat tetap untuk itu kita berpikir bahwa dalam hitungan Minggu sudah akan selesai tetapi ini sudah dalam hitungan bulan. Oleh karena mungkin diluar ekspektasi bahwa ternyata rakyat di Ukraina itu lepas suatu perlawanan yang sangat luar biasa, pasokan tadi karena adanya sanksi ekonomi lalu kemudian juga Rusia juga mengenakan sanksi ekonomi sebenarnya ke negara-negara barat karena dia tidak akan menjual ragas mereka di lain sebagainya ini yang mengganggu suplai ijin dari pasokan bahan-bahan yang sangat mendasar bagi dunia. inilah yang dapat dikatakan sebagai konsen bagi dunia dan bapak Presiden sebagai Presiden CG20 Presiden melihat bahwa perekonomian tidak akan bergerak perekonomian guna tidak akan bergerak dan berjalan apabila tidak kemudian di lakukan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina nanti.

Jurnalisme dalam mempromosikan kontekstualisasi narasi konflik secara objektif dan menantang konvensi berita yang dominan seperti berfokus pada sumber-sumber tertentu³. Seperti Prioritas bapak residen yang penting adalah memberikan waktu bahwa NATO tidak akan menerima Ukraina kepada Rusia dari sini yang harus dibicarakan pada pertemuan bapak Presiden di Jerman di G7 membicarakan ini dengan Presiden Amerika Jo Baiden mungkin dan lain sebagainya untuk mendapatkan jaminan bahwa negara-negara tersebut tidak akan menerima Ukraina. Inilah yang menjadi sumber dari konflik serangan Rusia ke Ukraina dan pada waktu bertemu dengan Bapak Presiden bisa menyampaikan bahwa otoritas di Ukraina tidak lagi menyerang warga negara Ukraina yang masih menggunakan budaya Rusia termasuk

³ Ija Suntana & Betty Tresnawaty, *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*

bahasa Rusia dan ini juga yang harus disampaikan kepada bapak Presiden Putin seperti itu baik approve jika dibicarakan terkait dengan Presiden CG20 ini akan bergulir dinamika juga dikalangan masyarakat dan dikalangan elit. Dengan ini dapat dikatakan potensi untuk Presidency Indonesia adalah masyarakat publik kita tidak melakukan ekspektasi yang berlebihan terhadap upaya yang dilakukan oleh bapak Presiden karena jika kita punya ekspektasi yang berlebihan tentu kekecewaan akan besar ini merupakan upaya walaupun percobaan ini pasti tetap ada unsur kegagalannya pertama kita harus paham bahwa Indonesia sebagai Presiden G20 perlu melakukan upaya yang dilakukan oleh bapak Presiden ini karena perekonomian dunia sedang mengalami stagnan, karena adanya peran ini kedua memang kita secara moral mempunyai kewajiban karena menurut konstitusi kita diamanatkan bahwa Indonesia harus turut dalam ketertiban dunia.

Sekarang ini dunia sedang tidak tertib dengan adanya serangan ini bapak Presiden akan mengupayakan tetapi dengan situasi sekarang ini masih ada serangan Rusia terhadap Ukraina yang tentu harus ada komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Rusia bahwa pertama menjelang kehadiran kedatangan bapak Presiden kecil serangan itu harus tidak boleh ada karena bapak Presiden ada di sana dan melakukan upaya yang sebenarnya berusaha juga akan mendapat keuntungan, tentunya Kemenlu kita harus mempersiapkan formula. Bagaimana genjatan senjata itu bisa terjadi dan memberikan menyampaikan kepada bapak Presiden untuk kemudian dikomunikasikan kepada para kepala pemerintahan kepala negara yang ikut di dalam G7⁴, kemudian di sampaikan juga kepada Presiden zaleski dan kemudian Presiden putin. Jadi upaya-upaya seperti ini harus dilakukan bukan sekedar bapak Presiden datang kemudian melakukan improvisasi di lapangan, melainkan juga harus dipahami oleh publik bahwa segala sesuatu tentu sudah dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri lobi-lobi awal dan lain sebagainya baik.

Tentunya upaya perdamaian ini rata kaitanya dengan dialog yang Intens begitu yang dibangun secara bertahap tidak hanya sekali datang begitu dalam tanda kutip profig, jika memang dalam pertemuan nanti antara pemerintah Indonesia Ukraina dan juga Rusia belum berbuah hasil ke depan ini. Upaya harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar juga kebutuhan pemerintah Indonesia terkait dengan impor pangan dari Rusia dan Ukraina ini juga bisa berjalan dengan lancar. Menurut

⁴ Mempan Online diakses melalui <https://www.menpan.go.id/> pada 30 Juni 2022

pandangan Hikmahanto Juwana jika gencatan senjata masih belum terjadi maka tetap kita akan menyampaikan undangan kepada Presiden zelinski dan Presiden Putin untuk hadir di forum G-20 bulan November nanti berharap kita berupaya agar ada pertemuan yang membahas tentang perang ini antara kepala-kepala pemerintahan negara yang sekarang G7 langsung dengan Putin atau dengan Presiden zelinski jadi biarkan merekalah yang akan membicarakan permasalahan diantara mereka ataupun jika sekarang Indonesia sebagai pihak ketiga yang mencoba membantu ini tetap kita harus diupayakan sebagai backup. Adapun encana cadangan jika gencatan senjata kali ini tidak berhasil yang kemudian jika gencatan senjata itu berhasil maka Presiden Jokowi bisa menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mendukung pasukan penjaga gencatan senjata tersebut sepanjang memang dimandatkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena kita mempunyai pengalaman yang panjang berkaitan dengan Fishkeeping Operation PCO yang dilakukan oleh PBB. Inilah yang wujud nyata wujud konkrit yang akan dilakukan oleh Indonesia dan semoga dengan ini bisa dikomunikasikan oleh Bapak Presiden kepada semua pihak sebelum Presiden ke Rusia dan juga Ukraina Presiden Jokowi juga akan G7 Seven terlebih dahulu di Jerman, dengan momen ini apa yang mungkin bisa menjadi sebuah momentum special sebelum datang ke Rusia dan juga Ukraina apa yang harus diusahakan.

Jika negara-negara G7 juga mengharapkan kehadiran bapak Presiden karena nanti negara tenaga tersebut tahu bahwa Presiden akan ke Ukraina dan Rusia sehingga dugaan ada pembicaraan-pembicaraan informal berkaitan serta kunjungan Presiden. Disini bapak Presiden tentu akan mengatakan pesan yang mereka ingin sampaikan tetapi juga sebaliknya mereka juga harus menerima Ukraina sebagai anggota NATO⁵ kemudian bapak Presiden perlu mendapat jaminan ini karena akan dibawa ke Presiden Rusia untuk menyampaikan hal ini. Kemudian bahwa ada jaminan bahwa negara-negara tersebut tidak membantu baik secara finansial maupun senjata untuk kemudian melakukan serangan terhadap Rusia mungkin ini juga yang diinginkan dengar oleh Presiden Putin lalu kemudian tentu negara-negara ini akan segera mencabut Embargo⁶ terhadap Rusia sehingga pasokan pangan dan lain sebagainya itu tidak mengganggu karena ini juga yang akan dibawa ke Presiden Rusia inilah yang

⁵ Nato Online diakses melalui <https://www.dw.com/id/nato/t-37747407> pada 29 Juni 2022.

⁶ Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja, I, Gede Pasek Eka Wisanjaya, I & Anak Agung Sri Utari, Analisis Terhadap Embargo Senjata Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

kemudian harus dikomunikasikan secara informal dengan negara-negara di G7 yang akan ditemui oleh Bapak Presiden.

2.3. Efektifitas Republik Indonesia dalam misi perdamaian Rusia Ukraina

Menanggapi misi perdamaian Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina, profesor hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan akan menyatukan seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung misi perdamaian yang dikirim Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Pasalnya, tindakan ini sangat tepat bagi Indonesia untuk menjadi nama besar bagi Indonesia di mata dunia tuan rumah KTT G20. Jokowi mendapatkan momentum yang memadai untuk menyampaikan misi perdamaianya kepada dunia, serta upaya Jokowi mengajak dunia untuk mengatasi konflik yang berdampak pada perekonomian internasional, khususnya krisis pangan.

Dalam pandangan Hikmahanto, untuk membanggakan Indonesia, Presiden Jokowi sejauh mungkin belum tercatat dalam sejarah sebagai presiden G20. Ia juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan kesempatan yang tepat untuk menyikapi perjuangan yang berdampak pada perekonomian internasional, khususnya krisis pangan, serta untuk menyampaikan misi perdamaianya kepada dunia.

Indonesia juga memiliki kewajiban penuh untuk menciptakan perdamaian di tanah ini. Karena dalam konstitusi nasional disebutkan bahwa bangsa Indonesia harus ikut andil dalam terciptanya perdamaian dunia⁷. Menurut konstitusi kita, Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam ketertiban dunia dalam pembukaannya. Indonesia tidak bisa diam karena dunia sedang kacau. Sebagai orang Indonesia, kita harus mendukung apa yang dilakukan Presiden.

Kedatangan Presiden Jokowi di Rusia dan Ukraina dalam misi menyelamatkan negara berkembang dari krisis pangan akibat gencatan senjata dan perang kedua negara. Kunjungan Park Jokowi adalah untuk gencatan senjata, dan presiden tidak memiliki tujuan ambisius dalam kaitannya dengan konflik yang ada, misalnya. Presiden juga realistis dengan situasi tersebut. Apa yang membuat presiden merenungkan masalah pangan sebelum bertemu dengan G7, Presiden Zelensky dan Putin dibahas agar negara-negara berkembang semua mengerti bahwa jika perang berlanjut, negara-negara berkembang akan mengalami krisis pangan yang parah.

⁷ Juwana. Hikmahanto, 2010. Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia berkembang .

sebagai negara

Hikmahanto juga menjelaskan perbedaan kunjungan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat negara lainnya, seperti pejabat Polandia dan Amerika yang datang ke Ukraina untuk memberikan bantuan keuangan dan senjata. Artinya, mereka tidak menginginkan perdamaian, sedangkan Presiden Jokowi datang dengan misi perdamaian. Misi perdamaian dan kemanusiaan yang dibawa oleh Presiden Indonesia Jokowi ke Ukraina dan Rusia telah membuahkan hasil. Setelah diskusi panjang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Putin mendapat jaminan pasokan produk makanan dan pupuk di masa depan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Kunjungan Jokowi ke Moskow dilakukan di Kyiv, Ukraina, bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan pada KTT G7 di Jerman. Presiden Jokowi mendukung upaya PBB untuk mengintegrasikan kembali makanan dan pupuk Rusia dan makanan Ukraina ke dalam rantai pasokan global. Terutama tentang jalur ekspor makanan Ukraina melalui jalur laut di Kremlin.

Hikmahanto juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, yang sebelumnya mengatakan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan makanan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia adalah kabar baik. Menurut Presiden Jokowi, gangguan pada rantai pasok pangan dan pupuk dapat berdampak pada ratusan juta orang di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Kepala negara telah memastikan bahwa dia dan rakyat Indonesia akan menjadi jembatan antara Rusia dan Ukraina untuk mencapai perdamaian. Untuk itu, presiden mengunjungi kedua pemimpin untuk bertemu.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa setiap orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkontribusi pada terciptanya perdamaian dunia. Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi memulai dialog damai dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa hal itu berkontribusi pada terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks ini, Presiden mengunjungi Kyiv dan Moskow. Ini adalah situasi yang sulit, tetapi penting untuk menemukan solusi damai dan membuka pintu untuk dialog.

Solusi yang paling mungkin untuk masalah Rusia dan Ukraina adalah win-win/win solution, yang menekankan sekali lagi fakta bahwa semua orang, termasuk Indonesia, yang terkena dampak perang ini sudah bosan dengan perang. Dan kita harus mengakhiri situasi ini yang mengakhiri pandemi COVID-19. Jika salah satu pihak bersifat global, masalah ini muncul, dan masalah ini sangat mengganggu.

Karena Rusia bukan Iran atau Irak, akan sulit bagi negara-negara Barat untuk "mengendalikan" Dewan Keamanan PBB untuk mencegah serangan itu. Hak veto⁸. Secara ekonomi, tidak mudah bagi Rusia untuk menghentikan serangan setelah melakukan embargo ekonomi, dan Presiden Putin memiliki legitimasi yang kuat untuk menjadi presiden di Rusia. Sebagai contoh, dapat ditekankan bahwa akan sulit bagi negara-negara Barat, Amerika Serikat dan sekutunya untuk memperlakukan Rusia seperti Irak atau Iran. Maka penting bagi presiden untuk hadir karena kita semua kelelahan. Satu-satunya solusi adalah bagaimana gencatan senjata terjadi terlepas dari apakah gencatan senjata berlanjut atau menguntungkan.

⁸ Voa Indonesia Online diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/hakveto> pada 30 Juni 2022

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia berdampak dengan terbukanya peluang dialog perdamaian dan perang datang dalam rangka untuk menciptakan tragedi kemanusiaan baik tragedi kemanusiaan maupun tragedi permasalahan lainnya yang berkaitan dengan tangan di dunia terutama di negara-negara berkembang. Hal ini yang pasti begini dua negara ini utamanya mungkin Rusia jika mereka memang sudah lelah mereka akan menghadapi muka jika jika Rusia akan menghentikan ini karena apabila tiba-tiba Rusia memutuskan tanpa angin dan sebagainya tentu dunia akan mengatakan bahwa sudah menyerah dan Rusia tidak mau melakukan itu. Oleh karena itu mereka membutuhkan pihak ketiga yang bisa menyelamatkan kita masing-masing dan dalam konteks inilah bapak Presiden Indonesia Jokowi hadir dan Presiden zelinski. Kemudian Presiden Ukraina menginginkan bahwa serangan itu dihentikan sementara.

Hal Ini sikap dari dua negara ini terhadap Indonesia memang dianggap bahwa Indonesia ini menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif yang netral. Ini berbeda dengan Indonesia, demikian baik artinya dalam hal ini Rusia juga sebenarnya membutuhkan Indonesia atau pihak ketiga untuk mendamaikan perang begitu sulit dilakukan dengan cara yang realistis terkait dengan Rusia juga karena keterbatasan pasokan gandum yang tidak minipsi dari segi ekonomi. Dengan kehadiran Indonesia sampai dengan hari 120 lebih dari yang mencoba untuk melihat-lihat senjata tidak di awal dimana ada Israel dan Turki baru kali pertama dimana dalam jangka waktu yang cukup lama ada negara dalam hal ini Indonesia yang mengupayakan hal ini.

Adapun rencana yang dapat dilihat jika pandangan senjata kali ini tidak berhasil jika kemudian pandangan senjata itu berhasil maka Presiden Jokowi dapat menambahkan Indonesia dimandatkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena kita memiliki pengalaman yang panjang dengan baik Fishkeeping Operation PCO yang dilakukan oleh PBB. Disini bapak Presiden tentu akan mengatakan pesan yang ingin mereka sampaikan tetapi sebaliknya mereka juga harus menerima Ukraina sebagai anggota NATO. Presiden perlu mendapat jaminan ini karena akan dibawa ke Presiden Rusia untuk menyampaikan hal ini. Kemudian bahwa ada jaminan bahwa negara-negara tersebut tidak membantu baik secara finansial

maupun senjata untuk kemudian melakukan serangan terhadap Rusia mungkin juga yang diinginkan untuk didengarkan oleh Presiden Putin. Yang mana secara global, kemudian muncul permasalahan ini dan permasalahan ini sangat mengganggu karena serangan ini tidak mudah untuk dihentikan oleh negara-negara barat yang memiliki “kendali” terhadap Dewan Keamanan karena Rusia Iran atau Irak itu negara yang memiliki hak Veto. Rusia secara ekonomi juga tidak mudah untuk kemudian diembargo secara ekonomi, kemudian serangan dan Presiden Putin juga memiliki legitimasi yang masih kuat untuk menjadi Presiden di Rusia. Adanya hak veto ini pada negara Rusia menjadi penghalang bagi negara Indonesia dan Ukraina dalam Win-win Solucion. Upaya perdamaian tersebut merupakan kegiatan hubungan internasional paradigma idealism dimana hubungan internasional itu diarahkan untuk membentuk suatu perdamaian dan bukan untuk penguasaan⁹.

⁹ Ija Suntana dan Mahmud, *Internasional Relation Paradigma: A Perspective of Islamic Political Science, The Social Sciences* Vol. 13 No. 4, 2018, hlm. 860

DAFTAR ISI

Buku

Juwana. Hikmahanto, 2010. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai negara berkembang* .

Jurnal/Artikel/Internet

Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja, I, Gede Pasek Eka Wisanjaya, I & Anak Agung Sri Utari, *Analisis Terhadap Embargo Senjata Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*

Jerit, J. & Barabas, J. (2017). *Meninjau Kembali Kesenjangan Gender dalam Pengetahuan Politik. Politik Perilaku*, hal, 817–838.

Mempan Online diakses melalui <https://www.menpan.go.id/> pada 30 Juni 2022

Metro TV Official diakses melalui <https://www.metrotvnews.com> pada 29 Juni 2022.

Nato Online diakses melalui <https://www.dw.com/id/nato/t-37747407> pada 29 Juni 2022.

Suntana, I. & Tresnawaty, 2021. *B., Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia*

Suntana, I & Mahmud, 2018, *Internasional Relation Paradigma: A Perspective of Islamic Political Science, The Social Sciences Vol. 13 No. 4, 2018,*

Times Indonesia Online diakses melalui <https://www.timesindonesia.co.id/Rusia-Ukraina> pada 29 Juni 2022

Tirto Online diakses melalui <https://amp.tirto.id/m/hikmahanto-juwana-zg> pada 28 Juni 2022

Voa Indonesia Online diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/hakveto> pada 30 Juni 2022